

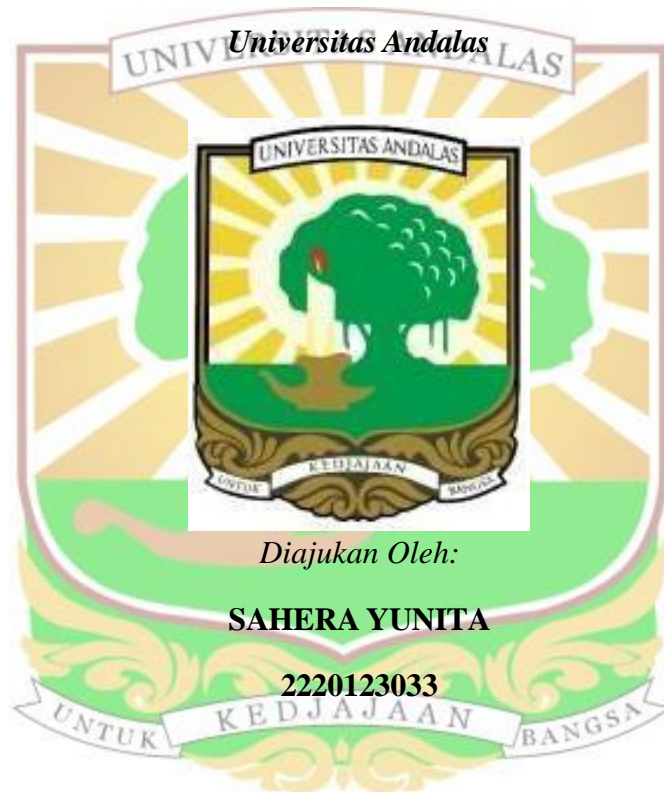
**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/
Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg dan Putusan Nomor 315/ Pdt/2021/ PT
MDN)**

TESIS

Diajukan guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh gelar

Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum



Diajukan Oleh:

SAHERA YUNITA

2220123033

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. INTERCOM MOBILINDO

**Sahera Yunita, NIM: 2220123033, Pembimbing I: Prof. Dr. Ferdi, S.H.,
M.H., Pembimbing II: Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum.**

Notaris haruslah bersikap profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris, terlebih saat meneliti hal-hal yang terkait dengan persyaratan formil UUPT 2007 dan UU Cipta Kerja mengatur penyelenggaraan RUPS Guna menjamin kepastian hukum atas keautentikan akta yang dibuatnya dan juga atas keabsahan penyelenggaraan RUPS.1) Bagaimana proses pengajuan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa? 2) Bagaimana pertanggung jawaban notaris terhadap akta RUPS dan akibat hukum pasca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg? Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ada di tangan Direksi, dengan didahului dengan tindakan pemanggilan RUPS, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta RUPS LB yang dibuat berdasarkan Akta PKR adalah pertanggungjawaban prosedural saja dan Notaris tidak bertanggungjawab atas materiil dari Akta tersebut. Dalam kasus ini Notaris melakukan kesalahan prosedural Notaris yaitu Pada Pasal 44 dimana Notaris bertanggung jawab atas kebenaran isi akta berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para pihak. Jika terjadi ketidaksesuaian atau penyimpangan, Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban tetapi notaris tidak meminta Akta Hibah Saham tersendiri dalam proses pemindahan saham tergugat yang dituangkan kedalam Akta RUPS LB sehingga Notaris bertanggungjawab dalam pemulihan dan pengembalian keadaan (*restitutio in integrum*). Akan tetapi Penggugat hanya menuntut Notaris untuk tunduk atas Putusan Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg yakni untuk tidak menghalang-halangi proses pemulihan dan pengembalian keadaan. Jadi, pertanggungjawab Notaris adalah dengan tidak menghalangi dimana Notaris harus memfasilitasi proses hukum dengan baik dan memastikan bahwa tindakannya tidak memperburuk kerugian yang dialami penggugat. Dengan bersikap transparan dan kooperatif, notaris menunjukkan itikad baik dan bertanggung jawab Penggugat dalam proses pemulihan Jika terdapat kesalahan administratif atau teknis pada akta notaris dapat melakukan perbaikan dengan membuat perbaikan terhadap akta yang sudah dibuat dan dilampirkan tambahan yang menjelaskan atau mengoreksi kesalahan harus dilakukan dengan persetujuan para pihak yang terlibat dan pengembalian keadaan. Akibat Hukum Pasca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg adalah pemulihan dan pengembalian keadaan) dimana Penggugat tetap sebagai pemegang saham dan Direktur PT. Intercom Mobilindo dengan cara Tergugat I melakukan RUPS LB kembali untuk pemulihan dan pengembalian keadaan sebagai pemegang saham dan Direktur pada PT. Intercom Mobilindo.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham, Notaris

ABSTRACT

NOTARY'S RESPONSIBILITY IN MAKING THE DEED OF THE EXTRA ORDINARY MEETING OF PT. INTERCOM MOBILINDO

**Sahera Yunita, NIM: 2220123033, Supervisor I: Prof. Dr. Ferdi, S.H.,
M.H. Supervisor II: Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum.**

Notaries must act professionally and comply with statutory regulations and uphold the Notary's Code of Ethics, especially when examining matters related to the formal requirements of the 2007 PT UUPT and the Job Creation Law regulating the holding of GMS in order to guarantee legal certainty regarding the authenticity of the deeds they make and also their validity. holding the GMS. 1) What is the application process for holding an Ordinary General Meeting of Shareholders and an Extraordinary General Meeting of Shareholders? 2) What is the responsibility of the notary regarding the GMS deed and the legal consequences following the Padang District Court decision Number 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg? By using normative research methods, this research concludes that the authority to organize the Annual GMS and Extraordinary GMS is in the hands of the Board of Directors, However, in this case the Notary made a Notarial procedural error, namely in Article 44 where the Notary is responsible for the correctness of the contents of the deed based on the information provided by the parties. In this case the Notary made a Notary procedural error, namely in Article 44 where the Notary is responsible for the correctness of the contents of the deed based on the information provided by the parties. If there is a discrepancy or deviation, the notary can be held responsible, but the notary does not ask for a separate Share Grant Deed in the process of transferring the defendant's shares which is stated in the Extraordinary GMS Deed so that the Notary is responsible for restoring and returning the situation (*restitutio in integrum*). However, the Plaintiff only demands that the Notary comply with Decision Number 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg, namely not to obstruct the process of recovery and restoration of the situation. So, the Notary's responsibility is not to get in the way, where the notary must facilitate the legal process well and ensure that his actions do not worsen the losses experienced by the plaintiff. By being transparent and cooperative, the notary shows good faith and is responsible. The plaintiff in the recovery process. If there are administrative or technical errors in the notarial deed, they can make improvements by making improvements to the deed that has been made and attaching an addition explaining or correcting the error. This must be done with the approval of the parties. parties involved and the return of the situation. The legal consequences following the Padang District Court Decision Number 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg are restoration and restoration of the situation) where the Plaintiff remains as a shareholder and Director of PT. Intercom Mobilindo, by means of Defendant I, held another EGMS to restore and restore his situation as a shareholder and Director at PT. Intercom Mobilindo.

Keywords: Limited Liability Company, General Meeting of Shareholders, Notary